

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI LABOMBO DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

M. Agung Prawira
NPP. 29.1388

*Asdaf Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: aprawira69@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Tourism is one of the priority sectors in Palopo City which is used to support the community's economy and to develop the region. One of the tourism objects with great potential and also the icon of beach tourism of Palopo City is Labombo Beach. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the collaboration process that has existed between the government and CV. Vista and to study the role of the community in helping both parties to develop Labombo Beach tourism objects, by the Tourism and Creative Economy Office in developing tourism in Palopo City, especially developing the Labombo Beach **Method:** The method used in this research is a qualitative research with descriptive method and using an inductive approach. Data were collected through semi-structured interviews, documentation, observation, and triangulation. Then the data is analyzed through data reduction techniques in order to provide an overview of the collaboration process carried out by the government and CV. Vista as well as the community. **Result:** The results showed that in the development of tourism, especially the Labombo beach tourism object in Palopo City, it was still not optimal, because there were still many weaknesses found in the collaboration process in tourism development which became an indicator of the development of Labombo Beach tourism object. As for the factors that affect the development are internal factors, which is a misunderstanding between the government and CV. Vista and weaknesses as well as external factors in the form of lack of promotion out of the area about beach tourism in Palopo City. **Conclusion:** Youth participation the Lorong Literasi Gowa Programs in Paccinongang Sub District has been going Based on these factors, researchers can find out the extent of the collaboration process carried out for both parties and the impact of the collaboration that has been carried out for the development of Labombo Beach tourism objects in Palopo City, South Sulawesi Province.

Keywords : Labombo beach tourism object, tourism, collaboration

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas di Kota Palopo yang dimanfaatkan untuk menopang ekonomi masyarakat dan membangun daerah. Salah satu objek wisata yang sangat potensial yang juga merupakan ikon wisata pantai dari Kota Palopo yaitu Pantai Labombo.. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi yang sudah terjalin antara pemerintah dan CV. Vista serta peran masyarakat dalam membantu kedua pihak mengembangkan objek wisata pantai labombo, oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mengembangkan pariwisata di Kota Palopo khususnya mengembangkan objek wisata pantai labombo. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif serta menggunakan pendekatan induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, dokumentasi, observasi, dan triangulasi. Kemudian data dianalisis melalui teknik reduksi data agar memberikan gambaran terkait proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan CV. Vista serta masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata khususnya objek wisata pantai labombo di Kota Palopo masih belum maksimal, karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata yang menjadi indikator pengembangan objek wisata Pantai Labombo. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata tersebut yaitu faktor internal berupa kesalah pahaman antara pemerintah dan CV. Vista dan kelemahan serta faktor eksternal berupa kurangnya promosi keluar daerah tentang wisata pantai di Kota Palopo. **Kesimpulan:** . Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti dapat mengetahui sejauh proses kolaborasi yang dilakukan bagi kedua pihak dan dampak dari kolaborasi yang telah dilakukan bagi pengembangan objek wisata pantai labombo di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Kata kunci : Objek wisata, pantai labombo, pariwisata kolaborasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang ada di Indonesia dimana keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi para penikmatnya. Keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia tidak hanya mengundang minat wisatawan lokal saja tetapi mengundang minat wisatawan mancanegara. Jenis objek wisata di Indonesia pun sangat beragam dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau, yang terbentang dari ujung barat Indonesia (sabang), ujung timur (merauke), ujung selatan (pulau rote), ujung utara (pulau miangas) yang membentang luas digaris khatulistiwa, dimana Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Sehingga dalam hal ini membuat Indonesia tidak hanya sebagai tempat persinggahan melainkan menjadi tujuan bagi para wisatawan diberbagai belahan dunia.

Kota Palopo berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan satu dari sekian banyak nya daerah yang memiliki keindahan di Indonesia. Salah satu objek wisata yang ada di kota palopo adalah wisata pantai dan wisata paling pantai yang paling terkenal di kota palopo adalah pantai labombo.

Pantai labombo merupakan salah satu objek wisata pantai yang berada di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi yang besar bila dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini di dukung dari letak pantai secara geografis aman dari ancaman hewan laut yang berbahaya serta memiliki

ombak yang tenang karena berada di teluk bone, teluk bone sendiri bukan lautan lepas hal ini menjadikan ombak yang ada di perairan teluk bone tergolong aman dari ombak besar. Dari hal ini berwisata dan berekreasi di pantai labombo bersama keluarga akan tergolong aman.

Selain letak yang strategis dari pantai labombo pastinya diperlukan pembangunan dan pengembangan untuk memajukan wisata pantai labombo. terlepas dari potensi yang dimiliki oleh pantai labombo, pemerintah tidak akan mampu mengambil alih pantai ini untuk dikembangkan karena banyak tempat wisata di kota palopo yang mesti pemerintah kembangkan, maka dari itu pemerintah secara bijak melakukan sebuah kolaborasi dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan wisata pantai labombo ini agar potensi yang dimiliki tetap berkembang dan terpelihara. Pemerintah melakukan sebuah kolaborasi dengan CV. Vista (swasta) sejak tahun 2009 dan sampai saat ini terus berkolaborasi untuk mengembangkan pantai labombo. Dengan adanya kolaborasi antar pemerintah daerah dengan swasta dapat memberikan stimulus yang baik bagi perkembangan maupun pembangunan pantai labombo di kota palopo. Berdasarkan pembahasan diatas pemerintah kota palopo telah mengeluarkan Peraturan Walikota No. 50 Tahun 2017 yang menyangkut semua urusan pariwisata yang ada di kota palopo, mulai dari fasilitas yang diberikan hingga para pelaku yang terlibat dalam pembangunan objek wisata ataupun para pelaku pelaksana kegiatan pariwisata.

Pada tahun 2017 ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bibin yang dimana penelitian ini terkait dengan tingkat presentase kepuasan wisatawan terhadap pantai labombo, dan hasil dari penelitian itu mendapatkan kesimpulan bahwa hal yang paling kurang dari pantai labombo adalah akses transportasi yang ada disekitaran pantai itu sangat kurang, sehingga membuat para pengunjung sulit untuk mendapatkan akses kendaraan seperti ojek dan lain sebagainya. Karena jarak jalan poros dengan pantai sendiri itu lumayan jauh yakni kurang lebih 700 meter.

Dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama CV. Vista tentu peran masyarakat juga dibutuhkan dalam untuk melengkapi kepingan kolaborasi yang sempurna untuk dijalankan pemerintah bersama pihak swasta. Alasan pemerintah melakukan kolaborasi ini agar pantai labombo tetap terpelihara dan mampu berkembang serta harapan pemerintah suatu saat pantai labombo menjadi objek wisata pantai yang mampu memiliki nama baik di tingkat nasional.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Adanya beberapa masalah terkait dengan pengembangan pantai labombo, salah satunya adalah masalah keterbatasan dana untuk mengembangkan pantai ini. Faktor lain yang menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas hiburan yang ada di sekitaran pantai dan akses transportasi di sekitaran pantai. Ini merupakan salah satu faktor utama dimana para pengunjung enggan datang dikarenakan fasilitas yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan mereka dan sulitnya mendapatkan kendaraan umum. Tidak hanya soal fasilitas hiburan yang kurang baik tapi akses transportasi seperti ojek, taxi, becak dan sejenisnya yang sangat sedikit berada disekitaran pantai. Dimana hal ini mengakibatkan keluhan para pengunjung yang tidak memiliki kendaraan pribadi, ketika hendak beranjak dari tempat wisata. Sehingga pemerintah mengharapkan peran masyarakat sekitar pantai dalam memudahkan para pengunjung untuk mengakses transportasi guna memenuhi keinginan ataupun kebutuhan lainnya.

Dari masalah diatas merupakan hal yang mengakibatkan jumlah pengunjung di pantai labombo sulit untuk meningkat.

Bagaimana pun kerasnya usaha pemerintah dalam mengembangkan suatu objek wisata tanpa peran masyarakat sekitar tetap akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Dengan dilakukannya kolaborasi merupakan suatu tindakan yang sangat efektif diambil oleh

pemerintah guna mempercepat pengembangan suatu objek wisata. Kolaborasi yang dilakukan tentu seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan khususnya objek wisata.

Adanya kesenjangan yang ini membuat pemerintah berpikir secara cerdas untuk tetap mengembangkan wisata pantai labombo dengan dana yang sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak mengeluarkan anggaran khusus untuk pengembangannya karena semua itu akan limpahkan kepada pihak swasta yang mengambil alih pantai labombo dengan kontrak jangka panjang. Adanya kolaborasi ini diharapkan jumlah pengunjung dapat bertambah.

Dan memang benar sejak diambil alih oleh pihak CV. Vista pengunjung yang datang di pantai labombo perlahan – lahan naik dan menjadi salah satu wisata pantai yang sering dikunjungi ketika weekend dan hari – hari libur lainnya.

Namun beberapa tahun terakhir perkembangan pantai labombo terbilang sangat lambat, adanya kolam renang air asin yang dibangun oleh pihak CV. Vista kurang baik dalam pembangunannya itu terlihat tidak elok. Bahkan terkesan seperti bangunan yang hanya setengah jadi dalam pengerjaannya, hal ini disebabkan adanya masalah kolaborasi bagi kedua belah pihak.

Adanya kesalahpahaman menjadi faktor utama pengembangannya kurang optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks collaborative, peran UU dalam pengaturan pariwisata maupun terkait tentang pariwisata itu sendiri. Penelitian Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron, yang berjudul Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (slbm) di kabupaten banyumas, Implementasi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas belum mampu mencapai tujuan kebijakan. Indikasinya adalah aksesibilitas masyarakat terhadap program yang belum merata serta tata kelola kelembagaan yang belum efektif. Hal tersebut disebabkan sistem kelembagaan program belum mampu mengelola interaksi sosial diantara berbagai pihak yang terlibat. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. Praktik implementasi dengan melibatkan ragam stakeholders memang membutuhkan beberapa prasyarat, seperti jejaring yang kuat, tingkat kepercayaan yang memadai, hingga akuntabilitas dari masing-masing aktor (Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko, dan Moh. Imron., 2017). Penelitian Gede Indra Bhaskara, sst. Par., m.sc., ph.D berjudul Kolaborasi antara sektor pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan pariwisata budaya di Bali menemukan bahwa promosi pariwisata budaya saat ini dialihkan dari wisatawan yang berjarak jauh ke wisatawan jarak pendek dan pengurus pariwisata Bali kini menekankan untuk mempromosikan tujuan untuk wisatawan Asia Oceania seperti Jepang, Korea, Cina, Taiwan, Selandia Baru dan Australia daripada pasar Eropa sektor publik dan swasta bekerja sama dalam mempromosikan pariwisata budaya melalui pameran dagang dan pameran yang diadakan di London, Berlin, Jepang dan Singapura (Gede Indra Bhaskara, sst. Par., m.sc., ph.D., 2017). Penelitian I Wayan Paramarta Jaya, I Gede Putra Ariana yang berjudul Peran undang – undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam perlindungan dan pelestarian objek wisata menemukan bahwa kegiatan Kepariwisata Indonesia mempunyai akar yang sangat kuat di dalam masyarakat yang bersumber pada nilai – nilai agama dan budaya yang di anut oleh bangsa Indonesia guna mewujudkan kelestarian pariwisata yang berkelanjutan (I Wayan Paramarta Jaya, I Gede Putra Ariana., 2014). Penelitian Betty Silfia Ayu Utami dan Abdullah Kafabih yang berjudul Sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi covid 19 menemukan bahwa tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88

persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia secara kumulatif selama periode Januari-November 2020 hanya mencapai 3,89 juta kunjungan, lebih rendah dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,73 juta wisatawan mancanegara atau mengalami penurunan tajam sebesar 73,60 persen (Betty Silfia Ayu Utami dan Abdullah Kafabih., 2020). Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Bibin tentang Persepsi wisatawan terhadap kawasan wisata pantai labombo di kota palopo menemukan bahwa sarana transportasi menuju lokasi wisata Pantai Labombo masih kurang. Transportasi pada umumnya biaya yang dikenakan mahal bagi pengunjung (Muhammad Bibin., 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melihat dan mengamati proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta serta melibatkan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata pantai labombo dan melihat dampak dari kolaborasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah bersama CV. Vista (swasta), metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif dengan pendekatan induktif guna untuk menggambarkan kondisi lapangan dengan detail juga berbeda dengan penelitian Denok Kurniasih dkk, Gede Indra Bhaskara, I Wayan Paramarta Jaya, I Gede Putra Ariana, Betty Silfia Ayu Utami bersama Abdullah Kafabih maupun Muhammad Bibin . Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Emersson, Nabatchi dan Balogh (Emersson, Nabatchi dan Balogh., 2012) yang menyatakan bahwa Dimensi kolaborasi ada tiga (3) yaitu : (1) Sistem Konteks, (2) Dinamika Kolaborasi, dan (3) Tindakan Kolaborasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui proses kolaborasi yang dilakukan dalam rangka mengembangkan objek wisata pantai labombo dan mengetahui seberapa baik dampak kolaborasi yang diberikan bagi perkembangan objek wisata pantai Labombo yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di Kota Palopo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif* dengan penelitian *Kualitatif* dan pendekatan induktif yakni menyajikan data yang didapat lapangan dan menggambarkan nya dalam bentuk narasi secara jelas dan terperinci. mendefinisikan masalah, merumuskan hipotesis atau solusi yang disarankan mengumpulkan, mengatur dan mengevaluasi data membuat deduksi dan mencapai kesimpulan dan akhirnya dengan hati-hati menguji kesimpulan untuk menentukan apakah mereka cocok dengan hipotesis perumusan (Woody dalam Kothari (2004 : 1)).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pemerintah), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut (Pemerintah), Direktur CV. Vista (swasta), dan tokoh masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis proses dan dampak dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak CV. Vista dan melibatkan masyarakat dalam pengembangan wisata pantai labombo di kota palopo menggunakan pendapat dari Emerson, Nabatchi dan Balog Dimensi kolaborasi ada tiga (3) yaitu Sistem Konteks, Dinamika Kolaborasi, dan Tindakan Kolaborasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Sistem Konteks

Penulis melakukan pengukuran terhadap beberapa bagian yang terbagi yakni pada penggerak prinsip bersama. Penggerak prinsip bersama merupakan dialog awal yang menjadi landasan untuk saling terbuka terkait tujuan kedua pihak melakukan sebuah kolaborasi. Penulis menemukan bahwa pemerintah kota palopo telah melakukan sebuah kesepakatan bersama CV. Vista pada tahun 2009 lebih tepatnya pada periode pemerintahan walikota kota palopo yang pertama bapak Drs. H. Patedungi Andi Tenriadjeng M.Si. pemerintah telah sepakat untuk melakukan kolaborasi dalam mengembangkan potensi yang ada di pantai labombo selama 20 tahun untuk kontrak pertama dan ada opsi perpanjangan untuk kontrak berikutnya apabila dinilai masih bersanggup untuk mengembangkan pantai labombo. kedua yaitu ketidakpastian. Berikutnya adalah ketidakpastian, ini merupakan sebuah risiko yang diambil oleh kedua belah pihak di awal masa kolaborasi yang dilakukan atau yang akan dilakukan dan menjadi tantangan terbesar bagi kedua belah pihak apakah kolaborasi ini akan menguntungkan satu pihak saja atau kedua pihak atau bahkan akan merugikan kedua pihak. Penulis menemukan bahwa dulunya pantai ini terabaikan sebelum dikelola oleh CV. Vista, dalam kolaborasi yang dilakukan, pemerintah memiliki kebingungan terhadap pengembangan pantai labombo bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau malah sebaliknya. Hal ini menjadi ketidakpastian dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama pihak swasta. Namun bila pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan pantai labombo, tentu pantai labombo tidak akan terpelihara dengan baik dan akan terkesan terbengkalai dan masalah ini akan ditujukan kepada pemerintah.

3.2. Dinamika Kolaborasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap dinamika kolaborasi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa bagian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi dan Balog yakni keterikatan prinsip point ini merupakan penyatuan kedua prinsip yang berbeda dan mengaitkan masing – masing prinsip menjadi satu alasan terjalannya sebuah kolaborasi karena tanpa adanya keterikatan prinsip ini akan menjadi sulit dilakukan karena memiliki tujuan yang berbeda. Peneliti menemukan bahwa memiliki latarbelakang yang berbeda antara pemerintah dan swasta namun memiliki tujuan yang sama ialah mengembangkan pantai labombo dengan potensi – potensi yang dimiliki. Dari perbedaan ini peneliti menemukan bahwa pemerintah melakukan kolaborasi melihat pembangunan dan pengembangan pantai labombo sedangkan CV. Vista melihatnya sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena potensi yang diberikan oleh pantai labombo tidak mengecewakan. Point berikutnya adalah motivasi, merupakan salah satu alasan kolaborasi ini terus berjalan walaupun ada beberapa masalah, namun itu tidaklah menjadi penghalang untuk tetap berkolaborasi. Dari data yang didapatkan oleh peneliti selama melakukan survei di lapangan bahwa kepercayaan walikota palopo yang pertama, menjadi alasan kuat CV. Vista mau mengambil alih pantai labombo ini dan menyetujui kontrak jangka panjang. Karena mendapatkan kepercayaan inilah

Pak Markus Tarukallo memiliki motivasi untuk membangun pantai labombo dan tidak mengecewakan walikota pertama kala itu. Kolaborasi dapat berjalan dengan baik bila memiliki motivasi bersama membangun suatu tempat menjadi lebih baik. Dan salah satu gambaran jelas adalah sebuah kepercayaan pemimpin daerah, seorang pemimpin yang telah percaya kepada rekan kerjanya tentu

3.3. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi merupakan perwujudan dari sebuah koordinasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Penulis membaginya atas dua point berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi dan Balog, yang pertama ialah dampak, sebuah kolaborasi yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok tentunya akan memberikan dampak yang besar maupun kecil. Sekecil apapun dampak yang diberikan, itulah sebuah hasil dari kolaborasi yang dilakukan. Dari hasil yang peneliti dapatkan setelah melakukan survei langsung dilapangan, dampak dari kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dan CV. Vista bisa dirasakan langsung ketika berkunjung ke pantai labombo. Pantai yang tertata rapih, bersih, indah dan nyaman bagi pengunjung merupakan bukti nyata yang diberikan oleh CV. Vista kepada para pengunjung dengan syarat membayar uang retribusi ketika akan masuk ke wilayah pantai dan itu dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000 per orang untuk hari biasa dan Rp. 15.000 per orang untuk hari libur. Nominal masih bersahabat bagi para pengunjung karena harga sebesar itu sebanding dengan apa yang akan didapatkan ketika berada di wilayah sekitaran pantai. Dari kolaborasi ini juga berdampak pada jumlah pengunjung yang datang, sebelum diambil alih oleh CV. Vista pantai labombo hanyalah sebuah pantai yang jorok, dan hanya ditempati oleh remaja – remaja yang ingin berpacaran karena pantai nya sepi dan tidak terurus. Setelah manajemen nya diambil alih oleh CV. Vista perlahan – lahan stigma pantai labombo mulai membaik dimata masyarakat. Dan mulai mengundang minat masyarakat untuk berkunjung ke pantai labombo sampai saat hari terakhir peneliti berada dilapangan, pantai labombo tetap menjadi salah satu wisata pantai yang memiliki peminat yang cukup banyak. Jumlah pengunjung setiap harinya selain hari libur bisa mencapai sampai 50 orang dan untuk hari libur mencapai 100 orang lebih, angka ini peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan Direktur CV. Vista yaitu Bapak Markus Tarukallo.

Point berikutnya adalah adaptasi, hal ini menunjukkan umpan balik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam berkolaborasi. Lancar tidaknya sebuah kolaborasi yang dilakukan itu tergantung dari umpan balik bagi kedua pihak yang bersangkutan, kebanyakan masalah kolaborasi muncul ketika salah satu pihak tidak memberikan umpan balik yang diharapkan oleh pihak lainnya. Dan masalah kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama CV. Vista, peneliti temukan pada point ini. Dari sudut pandang pemerintah yang dalam kasus ini diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kota palopo mengatakan bahwa CV. Vista selalu mengkir ketika pemerintah meminta laporan pertanggung jawaban pertriwulan guna mengetahui seberapa banyak jumlah pengunjung yang datang setiap harinya dan berapa pemasukan setiap harinya yang diakumulasikan pertriwulan. Laporan yang diberikan pengelola pantai labombo kepada pemerintah selalu tidak perenuhi dan sering terlambat, hal ini membuat pemerintah memberikan Surat Peringatan kepada pihak pengelola untuk ditindak lanjuti, namun sangat disayangkan, sekalipun Surat Peringatan telah dikeluarkan pihak pengelola pantai seakan tidak peduli dengan peringatan itu, bahkan pemerintah telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian perjanjian lain yang telah disepakati dan menjadi kewajiban bagi pihak pengelola pantai adalah pemberian retribusi dari pihak kedua kepada pihak pertama dalam hal ini adalah pemerintah. Sedangkan dari sudut pandang pihak swasta atau pihak pengelola pantai mengatakan bahwa tidak ada pemasukan yang bisa menjadi

laporan untuk dibawah kepada pemerintah karena adanya pandemi yang mengakibatkan jumlah pengunjung menjadi sangat sedikit bahkan terkadang tidak ada satupun pengunjung yang datang karena pandemi Covid – 19 dan diberlakukannya penutupan tempat umum yang bisa mengundang kerumunan massa. Hal ini tentu dikeluhkan oleh pihak pengelola karena kejadian ini semua berada diluar kendali dan menjadi salah satu bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Dikatakan bahwa dalam surat perjanjian kontrak yang dilakukan oleh pemerintah bersama CV. Vista tertulis “apabila *force majeure* terjadi, pihak kedua harus memberitahu secara tertulis kepada pihak pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi *force majeure*, dan untuk ini pihak kedua tidak dikenakan kewajiban atau denda maupun sanksi”. *Force majeure* sendiri merupakan hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan kesepakatan perjanjian kerjasama yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak seperti bencana alam maupun keadaan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari permasalahan diatas peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa permasalahan nya terletak pada kesalahpahaman kedua pihak, pihak pertama mestinya membaca ulang perjanjian kontrak yang telah disepakati dan lebih terbuka ketika adanya permasalahan ini sedangkan dari pihak kedua adalah tetap memenuhi panggilan yang diminta oleh pemerintah pun kalau pemasukannya tidak ada atau kurang dari apa yang telah disepakati, dilaporkan saja secara terbuka tanpa adanya hal yang ditutupi karena hubungan kolaborasi bisa baik kalau kedua pihak saling terbuka menghadapi masalah yang ada, tidak saling curiga dan tetap saling percaya satu sama lain.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kolaborasi ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan objek wisata pantai labombo mulai dari kebersihan, kerapihan, pembangunan wahana bermain sampai adanya gedung pertemuan yang dapat disewa untuk digunakan berbagai macam acara di pinggiran pantai. Bila dibandingkan dengan kondisi pantai ketika sebelum dikelola oleh CV. Vista akan sangat nampak perbedaan. Sampah organik maupun anorganik menjadi pemandangan yang akan nampak dibagian wilayah pantai labombo, kayu besar bekas penebangan pohon liar merupakan hal yang sangat biasa muncul di pinggiran pantai. Selain dari sampah – sampah yang berserakan, banyaknya rumput – rumput liar yang tinggi membuat kesan pantai ini terlihat jorok dan menyeramkan sehingga sangat sedikit bagi warga yang ini berkunjung ke pantai ini. Setelah diambil alih oleh pihak CV. Vista tahun 2009 perlahan – lahan pantai ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi.

Berdasarkan kolaborasi yang dilakukan ternyata ada masalah sehingga menjadi faktor utama mengapa perkembangan pantai labombo beberapa tahun ini sangat lambat. Dari data yang peneliti temukan dilapangan berdasarkan wawancara dan membaca kesepakatan kontrak kerjasama pemerintah kota palopo dengan CV. Vista, ternyata anggaran pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di pantai labombo itu sepenuhnya dibebankan kepada pihak kedua (pihak pengelola) dan pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk membantu membangun dan mengembangkannya pantai labombo, selain itu pihak kedua juga diwajibkan membayar retribusi kepada pemerintah sebesar Rp. 40.000.000.00-, (empat puluh juta rupiah) pada tahun kedua dan akan bertambah setiap tahunnya. Ini merupakan kewajiban pihak pengelola kepada pemerintah. Namun pemasukan yang didapatkan dari pantai labombo sepenuhnya diambil oleh pengelola dan dilaporkan kepada pemerintah per triwulan. Dalam kesepakatan bersama antara pemerintah kota palopo dengan CV. Vista ternyata didalam nya tertulis hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan ada tertulis hal yang menjadi alasan kewajiban berubah menjadi *tidak diwajibkan* yaitu *Force Majeure*, dimana hal ini bisa berlaku ketika terjadi suatu keadaan yang berada diluar kendali kedua pihak, seperti bencana alam, pemogokan kerja, huru hara, sabotase, keadaan darurat yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang mempengaruhi

ekonomi pada umumnya. Dalam hal ini pandemi Covid – 19 merupakan bencana alam yang berada diluar kendali dari kedua belah pihak, tidak satupun pihak yang mampu mengatasi bencana ini. Dari pandemi yang terjadi pemerintah dalam rangka mengurangi atau memutus penyebaran Covid – 19 di kota palopo, pemerintah melakukan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) di kota palopo sehingga banyak tempat wisata yang ditutup agar menghindari kerumunan massa yang bisa menyebabkan penularan virus corona menyebar dengan cepat. Dari langkah pemerintah melakukan PSBB ini, pemasukan dari pantai labombo ini tidak ada, tidak ada pengunjung sama saja tidak ada pemasukan, namun pemerintah tetap mewajibkan retribusi yang seperti keadaan normal. Hal ini tentu menjadi keluhan bagi pihak pengelola karena mau mendapatkan uang dari mana bila pengunjung tidak ada karena PSBB yang dilakukan. Dari kejadian inilah hubungan kedua belah pihak menjadi kurang baik. Selain hal itu pemerintah pihak pengelola juga selalu menghindari pemerintah ketika akan dimintai laporan pertanggung jawaban. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah, pemerintah tidak semata – mata hanya menginginkan retribusi dari pihak pengelola, pemerintah juga ingin tahu perkembangan pantai labombo ini sejauh mana, untuk mengetahui hal itu pemerintah melihat nya melalui laporan pertanggung jawaban dari pihak pengelola sedangkan pihak pengelola saja sering menghindari laporan pertanggung jawaban ini. Salah satu kewajiban dari pihak kedua merupakan penyampaian laporan secara berkala kepada pemerintah tentang perkembangan dan pengelolaan pantai labombo.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor lain yang dapat menjadi pendukung meningkatnya jumlah wisatawan di pantai labombo, yakni dengan melakukan sebuah acara atau tradisi di pantai labombo, seperti Ma'cera' Tasi'. Kegiatan ini merupakan sebuah budaya di tanah luwu yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Ketika diadakan acara ini, otomatis jumlah pengunjung yang datang akan bertambah dari hari biasanya, sehingga para pengunjung yang baru melihat kondisi pantai bisa mendapatkan kesan yang menarik, imbasnya para pengunjung yang awalnya hanya ingin melihat sebuah tradisi menjadi berminat untuk kembali datang ke pantai labombo untuk berekreasi bersana keluarga. Dan ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk menambah minat para wisatawan untuk berkunjung ke pantai labombo.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah berdampak positif bagi perkembangan dan pembangunan pantai labombo, terlepas dari dampak yang ada tentu masalah dari proses kolaborasi tidak dapat kita hindari. Adanya masalah terkait mangkirnya CV. Vista dalam pelaporannya sampai pemerintah yang kurang terbuka dalam menghadapi masalah ini menjadi bumbu pelengkap dari sebuah kolaborasi yang diharapkan akan lebih baik kedepannya. Masalah ini baru saja terjadi beberapa tahun belakang sejak tahun 2019 dan merupakan hal perlu segera diselesaikan oleh kedua pihak agar kerjasama kedepannya bisa menjadi lebih baik. Bila masalah ini dibiarkan berlarut – larut tanpa adanya penyelesaian maka akan sangat berdampak bagi pengembangan wisata pantai labombo. Dari kedua pihak yang peneliti sebutkan dari awal, peran dari masyarakat juga tak kalah penting nya yaitu dengan menjaga ketertiban lingkungan sekitar pantai dan juga sebagai penyedia jasa transportasi bagi para pengunjung pantai. Masyarakat telah dilarang melakukan perdagangan di sekitaran pantai karena pihak pengelola merasa bahwa masyarakat tidak mau menaati aturan yang ditetapkan oleh pengelola pantai. Masalah kebersihanlah yang menjadi faktor utama pihak pengelola melarang masyarakat untuk berjualan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu objek saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Emerson, Nabatchi dan Balog

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan proses kolaborasi dan dampak dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kota palopo dengan pihak CV. Vista di Kota Palopo untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta jajarannya, Pihak pengelola pantai yakni CV. Vista terkhusus Direktur CV. Vista yg meluangkan waktunya untuk memberikan gambaran terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti serta Tokoh Masyarakat yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Ananlisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1).
- Achmad Afandi, Sunarti, Luchman Hakim. 2017. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik*. Malang: Universitas Brawijaya
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Rineka Cipta.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Ilmu Hukum*, 64.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (T. D. Press (ed.)). Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.
- Bhaskara, G. I. (2017). *Kolaborasi antara sektor pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan pariwisata budaya di Bali*.
- Bibin, M. (2017). *Persepsi Wisatawan Terhadap Kawasan Wisata Pantai Labombo di Kota Palopo*.
- Digdoweisieso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- <https://www.pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/80-pedoman-perilaku-hakim>
- Jaya, I. W. P., & Ariana, I. G. P. (n.d.). *Peran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam Perlindungan dan Pelestarian Objek Wisata*. Kepariwisataaan.
- Khotari. (2004). *Research Methodology: Methods & Techniques Second Revised Edition*. New Age International.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7.
- Lawrence, N. W. (2006). *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative*. Allyn And Bucon.
- Moleong. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.

- Mulyadi, M. (2014). *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Publica Press.
- Nain, U. (2018). *Wisata Pembangunan Desa : Suatu Autokritik*. Insistpress & Amongkarta.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, F. D. C., Mardiyono, & Rengu, S. P. (n.d.). Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Administrasi Publik*, 2, 325–331.
- Palopo dalam angka tahun 2021
- Parameshwari, A., Fajrina, D. O. M., & Amsyah, E. (2020). *Collaborative Governance Dalam Manajemen Tata Ruang di Cafe Sawah Pujon Kidul Kabupaten Malang*. Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palopo No. 04 tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005
- Putri, R. K. (2015). *Pengembangan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Bukittinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Universitas Andalas.
- Spillane, James.J.1989. *Pariwisata Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia.
- Sugiyono. (2011). *Metode peneltian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Tupoksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palopo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
- Yoeti, Oka. A. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

